

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 10 (2) tersebut pemerintah daerah berwenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan. Dengan adanya desentralisasi ke daerah sebagai harapan yang menjanjikan, maka perluasan wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali setiap potensi daerah. Jadi disini pemerintah daerah sebagai ujung tombak dari implementasi otonomi daerah dalam menciptakan berbagai pendapatan daerah dan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan berbagai potensi daerah di setiap sektor. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga secara sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan pada prinsipnya merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk memajukan modernisasi dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara lahir maupun batin. Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Disinilah peran pemerintah harus lebih jeli menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki negara, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena pada dasarnya pembangunan diselenggarakan oleh rakyat bersama pemerintah. Peranan masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan, dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan, bahwa hak, kewajiban dan tanggung

jawab seluruh masyarakat, maka hasil hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menurut peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata Nomor: KM.67 / UM.001 /MKP/ 2004, tentang pembangunan pariwisata adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan saat ini dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan masa yang akan datang, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dicirikan menjadi patokan dalam pengaturan sumberdaya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika tercapai dengan tetap menjaga integritas budaya proses-proses keanekaragaman hayati.

Pembangunan pariwisata pada prinsipnya merupakan usaha mencapai pembangunan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernisasi dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara lahir maupun batin. Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Disinilah peran pemerintah daerah harus lebih jeli menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki negara, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena pada dasarnya pembangunan diselenggarakan oleh rakyat bersama pemerintah. Peranan masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan, dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan,

bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh masyarakat, maka hasil hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994 : 14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini salah satunya adalah potensi pariwisata.

Perkembangan dunia pariwisata yang cukup pesat serta tipologi wisatawan yang beragam membuat daerah tujuan wisata mulai menggeliat dengan meningkatkan sarana dan prasarana.

Sumatra Barat sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia, juga mempunyai peranan yang penting dalam hal ini wilayah yang cukup luas dan terdiri dari Kabupaten/Kota yang mempunyai objek wisata yang bagus sehingga menjadikan Sumatra Barat menjadi tujuan wisata handalan. Lain dari pada itu Kota Padang merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatra Barat memiliki suatu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Dalam upaya pengembangan objek wisat pantai Air Manis, pemerintah daerah harus merencanakan suatu strategi, yaitu suatu usaha atau kegiatan untuk meningkatkan fungsi wisata yang ada didaerah. Strategi tersebut dibarengi dengan penambahan dan peningkatan berbagai fasilitas yang mendukung kepariwisataan.

Pengelolaan kepariwisataan pada hakekatnya sama dengan mengelola sebuah perusahaan dengan produk tertentu. Usaha ini melibatkan juga penjual yang terdiri atas pemerintah dan para pengusaha-pengusaha di sektor kepariwisataan seperti pengusaha hotel, restoran, biro perjalanan dan lain-lain, sementara itu sebagai pelanggan atau pembeli adalah para wisatawan itu sendiri baik itu yang berasal dari mancanegara maupun nusantara. Sehingga pemerintah Kota harus melakukan suatu strategidalam meningkatkan pengelolaan objek wisata khususnya pantai air manis. Adapun visi dan misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang adalah:

Visi

Menjadikan Kota Padang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang berkualitas, yang ramah lingkungan dan tetap menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau
(*Adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah*)

misi

1. Melindungi, Memulihkan dan Menata Potensi Objek Wisata yang ada melalui konsep pengembangan yang berkelanjutan.
2. Memelihara Nilai-nilai Ajaran Agama, Adat Istiadat dan Seni Budaya Daerah.
3. Mencari Peluang Pasar dan Investasi baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
4. Menggalang Apresiasi, Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat Banyak terhadap Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kepariwisata.

Dari visi dan misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tersebut terlihat begitu besar rencana pemerintah dalam mengembangkan pariwisata. Apabila dibandingkan Kota Padang dengan daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang maju seperti Bali, Kota Padang tidak akan jauh tertinggal, karena Kota Padang juga memiliki objek wisata yang lengkap. Kota Padang memiliki beragam objek wisata yang bagus seperti objek wisata pantai, objek wisata gunung, objek wisata darat, objek wisata budaya dan wisata kuliner. Tetapi kenapa Kota Padang belum bisa menjadi kota wisata yang dapat membangun daerah dari pariwisata tersebut, seperti halnya Bali yang mana pariwisata merupakan tulang punggung dalam membangun daerahnya.

Sebenarnya kota Padang dari sektor pariwisata mampumewujudkan pembangunan. Karena begitu banyak potensi wisata yang belum dikembangkan. Selama ini wisatawan, baik wisatawan lokal maupun asing hanya terpaku dengan kawasan wisata di daerah pantai saja, dan melupakan banyak daerah yang bukan pantai juga menarik untuk dikunjungi.

Objek Wisata Pantai Air Manis merupakan objek wisata unggulan di Kota Padang yang mempunyai cerita yang sangat terkenal dimana-mana, oleh sebab itu banyak turis mancanegara maupun wisatawan lokal yang ingin melihat langsung bukti sejarah yang masih ada pada objek wisata Pantai Air Manis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2009-2014 dalam peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang pembangunan pariwisata menerangkan bahwa Kota Padang memiliki potensi wisata yang beragam, baik berupa wisata alam (pantai, goa, hutan, pegunungan, dan panorama alam), wisata budaya (benda dan bangunan cagar budaya, seni tradisional), wisata buatan (wisata belanja, kuliner, dan kriya yaitu sesuatu yang dapat menjadi souvenir), serta wisata bahari (pulau-pulau) yang semuanya itu dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang menarik dan layak dikunjungi.

Kota padang menmiliki potensi pariwisata yang besar tersebut akan tetap merupakan potensi apabila tidak dikelola dengan baik. Pengembangan suatu kawasan objek wisata tidak mungkin dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kota Padang tidak melakukan langkah-langkah yang proaktif, dari sektor pariwisata. Untuk mengetahui pengembangan objek wisata pantai Air Manis, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Padang Sumatra Barat”***

1.2.Rumusan Masalah

Bencana gempa yang terjadi beberapa tahun terakhir yang telah menghancurkan banyak bangunan di kota Padang sehingga mengharuskan Kota Padang bangkit lagi dari keterpurukan khususnya dilihat dari bangunan kotanya. Kota Padang harus membangun lagi semua yang hancur akibat musibah gempa tersebut. Dengan demikian daerah sangat membutuhkan dana yang sangat besar, oleh sebab itu sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga dapat membantu pembangunan daerah, untuk itu penulis ingin mengetahui beberapa faktor dalam pengembangan objek wisata Pantai Air Manis.

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata Pantai Air Manis Padang?
2. Apa kendala yang ditemui dalam pengelolaan objek pariwisata Pantai Air Manis di Kota Padang?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mendeskripsikan pengelolaan objek wisata pantai Air Manis
2. Mengidentifikasi kendala yang ditemui dalam pengelolaan objek wisata di Pantai Air Manis.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kota Padang mengenai pengelolaan pariwisata di Kota Padang, khususnya pada objek wisata Pantai Air Manis Padang.